

Dapat Suntikan Rp46 Miliar



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 03/10/2025

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berupa anggaran senilai Rp46 miliar untuk peningkatan layanan kesehatan tahun 2026.

Jakarta – Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan hasil pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10). “PPU membutuhkan sinergi langsung dengan Kemenkes untuk mendukung peningkatan layanan dasar di bidang kesehatan. Hadirnya IKN menuntut percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan,” tegas Mudyat.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan alat kesehatan modern seperti *CT-Scan* dan *Cathlab* di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), serta peningkatan infrastruktur RSUD Sepaku dan Puskesmas di empat kecamatan. Menurut Mudyat, fasilitas kesehatan yang memadai sangat mendesak. Karena masih banyak warga PPU yang harus dirujuk ke Balikpapan untuk layanan medis lanjutan. “Kondisi itu menyulitkan warga dan mengurangi potensi pendapatan daerah,” ungkapnya.

Mudyat menyambut baik bantuan Kemenkes RI. Hal itu menjadi kabar baik bagi masyarakat PPU. “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkes,” ujarnya. Mudyat juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan tidak hanya pada fasilitasnya saja, juga SDM. “Kami siapkan dokter spesialis agar pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah semakin optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante menegaskan komitmen pemerintah pusat. “Kemenkes akan menyalurkan bantuan Rp46 miliar untuk RSUD Ratu Aji Putri Botung sebagai bentuk dukungan percepatan layanan kesehatan di daerah penyangga IKN,”

jelasnya. Dia menilai penguatan sarana kesehatan di PPU sangat penting agar masyarakat tidak lagi harus keluar daerah untuk berobat. “Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat mendapat layanan kesehatan yang baik tanpa terkecuali,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Dapat Suntikan Rp46 Miliar, 03/10/2025
2. TRIBUN KALTIM, Pasien dari PPU Kerap Dirujuk ke Balikpapan, 03/10/2025
3. KORAN KALTIM, Bupati Temui Kementerian Kesehatan PPU Terima Anggaran Rp46 Miliar Tahun Depan, 03/10/2025

Catatan:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
2. Pasal 3 UU 36/2009 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Dalam Pasal 14 UU 36/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
 - (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.
4. Dalam Pasal 19 UU 36/2009 diatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.